BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut setiap tahun melaksanakan berbagai program yang dilakukan oleh bagian humas. Salah satu program tersebut adalah program pemberdayaan komunikasi dan informatika melalui kegiatan MCAP (*Mobile Community Acces Point).* Program dan kegiatan ini adalah sebagai upaya menuju masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Garut dalam mengakses dan bertukar informasi serta meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi melalui teknologi komunikasi secara efektif.

Menurut Humas pemerintah daerah kabupaten garut: "Meskipun dari tahun ke tahun teknologi semakin berkembang dan canggih ternyata masih ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Garut yang masih kesulitan untuk mengakses internet."

Dari kasus tersebut kemudian humas pemerintah kabupaten Garut akhirnya membentuk program *Mobile community Acces Point* atau MCAP tersebut, ini merupakan bentuk kerja sama humas pemerintrah kabupaten Garut dengan Diskominfo yang bergerak menelusuri cakupan sinyal internet berbasis Telkom flexy. Program ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait jaringan teknologi telekomunikasi, memahami teknik jaringan komputer dan teknologi internet. Ini merupakan bentuk perhatian dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Garut.

Melalui kegiatan ini diharapkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana layanan informasi untuk pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Beberapa langkah telah diupayakan guna terlaksananya layanan informasi tersebut, diantaranya menjadikan kabupaten Garut sebagai salah satu kota riset bidang teknologi informasi, dan menjadikan Website Garut sebagai Web resmi Pemerintah Kabupaten Garut yang menyediakan akses informasi yang informatif sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan informasi terkait pembangunan daerah.

Tugas yang dijalankan humas Pemerintah Daerah tersebut salah satunya yaitu melakukan program sosialisasi seperti pemberdayaan komunikasi dan informasi untuk masyarakat Garut dengan melalui kegiatan MCAP *(Mobile Community Acces point*). Adapun definisi Humas menurut Frank Jefkins yang diterjemahkan oleh Daniel Yadin adalah:

> ”Sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dari semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”. (Jefkins, 1992:9).

Dengan adanya kegiatan *Mobile Community Acces Point* ini masyarakat di berbagai kecamatan Garut dapat mengakses internet dengan gratis. Ini merupakan bentuk kepeduliaan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pola komunikasi humas pemerintah daerah garut yaitu program pemberdayaan komunikasi dan informatika untuk masyarakat kabupaten Garut melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point* (MCAP), kemudian peneliti ingin mengetahui pola

komunikasi humas pemerintah daerah Garut saat menjalankan program dan kegiatan tersebut.

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini pun tidak hanya sekedar bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pola komunikasi dari humas pemerintahan daerah Garut dalam menjalankan program tersebut untuk masyarakat garut, namun juga mencoba mencari tau motif yang melatar belakangi pola komunikasi tersebut.

Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soekanto, 2001). Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistemik dan logis (Effendy, 1989).

Secara teoritis pola komunikasi didefinisikan yaitu “sebagai hubungan-hubungan khas dan berulang antar komponen komunikasi” (Kuswarno, 2008:20). Namun secara konseptual, pola komunikasi dalam penelitian ini merupakan wujud dari interaksi sebagai hubungan-hubungan yang khas dan berulang dari setiap pengurusnya.

Pola komunikasi bisa saja diamati melalui jaringan-jaringan komunikasi yang terjadi secara berulang-ulang, dengan melihat aspek bagaimana humas pemerintah daerah kabupaten Garut mampu untuk menjadi organisasi di tengah-

tengah masyarakat yang mempunyai fungsi salah satunya penyebaran informasi, akan menghadapi kompleksitas pola-pola komunikasi atau yang dikatakan Kuswarno sebagai bentuk hubungan-hubungan khas dan berulang antar komponen komunikasi yang akan dilakukannya bagi penunjang pelaksanaan program pemberdayaan komunikasi dan informatika.

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting bagi makhluk sosial untuk dapat menjalin serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Manusia selalu mencoba berkomunikasi dan membuat dirinya mengerti perihal mengenai segala sesuatu. Makna dari komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan melalui media/saluran yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap atau perilaku komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator.

Pengetahuan dasar tentang komunikasi saja belum cukup memadai untuk dapat memahami suatu mekanisme proses komunikasi di dalam organisasi dengan baik. Karena komunikasi itu terjadi pada suatu lingkungan tertentu yang mempunyai struktur, karakteristik, serta fungsi tertentu yang memungkinkan berpengaruh kepada proses komunikasi. ”Komunikasi Organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit – unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu” (R.Wayne Pace & Don Faules, 1993:31).

Dalam komunikasi organisasi kita bicara tentang informasi yang berpindah secara formal dari seseorang yang otoritasnya lebih tinggi kepada orang lain yang otoritasnya lebih rendah (komunikasi kebawah). Informasi yang bergerak dari

suatu jabatan yang otoritasnya lebih rendah kepada orang yang otoritasnya lebih tinggi (komunikasi ke atas). Informasi yang bergerak diantara orang orang yang jabatan jabatan sama tingkat otoritasnya (komunikasi horizontal).

Organisasi pada dasarnya terdiri atas kelompok-kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu judul yang diangkat pada penelitian ini adalah Pola Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Untuk Masyarakat (Studi Kasus Pada Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Mengenai Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika melalui kegiatan Mobile Community Acces Point Di Kabupaten Garut).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Rumusan makro dalam masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Pola Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam program Pemberdayaan Komunikasi Dan Informatika melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point*?"

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

1. Bagaimana **jaringan komunikasi** humas pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam program pemberdayaan komunikasi dan informatika melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point?*

2. Apa **faktor-faktor pendukung** humas pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam program pemberdayaan komunikasi dan informatika melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point?*
3. Apa **hambatan-hambatan komunikasi** yang dialami humas pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam program pemberdayaan komunikasi dan informatika melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point?*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menceritakan dan menggambarkan pola komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam program pemberdayaan komunikasi dan informatika untuk masyarakatnya melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point.*

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih terarah maka perlu dirumuskan tujuan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jaringan komunikasi humas pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam program pemberdayaan komunikasi dan informatika untuk masyarakat Garut melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point.*
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung humas pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam program pemberdayaan komunikasi dan

informatika untuk masyarakat Garut melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point*.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan komunikasi yang dialami humas pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam program pemberdayaan komunikasi dan informatika untuk masyarakat Garut melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point.*
4. Untuk mengetahui Pola Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam program Pemberdayaan Komunikasi Dan Informatika Untuk Masyarakat Garut melalui kegiatan *Mobile Community Acces Point.*

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan bagi ilmu komunikasi umumnya dan komunikasi organisasi pada khususnya terutama pembahasan mengenai pola-pola komunikasi organisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian penelitian sejenis. Lalu semoga dapat menjadi masukan bagi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan program-programnya terutama program *Mobile Community Acces Point.*

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki kegunaan bagi segala pihak. Kegunaan praktis yang telah peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti sebagai aplikasi ilmu komunikasi dalam penggunaanya dan suatu pembelajaran mengenai pola komunikasi yang dilakukan oleh humas pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
2. Untuk akademisi sebagai literatur untuk para mahasiswa di bidang ilmu komunikasi yang akan melakukan penelitian, mengenai pola komunikasi.
3. Untuk lembaga agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan kelompok masyarakat agar dapat menjadi literasi, gambaran, dan rujukan dalam melakukan komunikasi organisasi sehingga meminimalisir hambatan hambatan komunikasi untuk membangun pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang informatif.